



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
UNIT KERJA : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AGUS SUDIYANTO**
2. Jabatan : **ASISTEN KASN**
3. NHK : **54879**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.130.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 76 m2/130 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 153.000.000

1. MOTOR, YAMAHA X-RIDE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, CHEVROLET CAPTIVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. MOTOR, HONDA VERZA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 6.036.657**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.309.036.657



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.309.036.657

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.